

Diskusi Publik Ke-2 ETIKA DAN POLITIK

**Narasumber:
FRANZ MAGNIS-SUSENO**

**Diselenggarakan oleh
FOREIGN POLICY COMMUNITY INDONESIA CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Media Zoom – 13 Juli 2024

ETIKA DAN POLITIK: Mengapa Kita Tidak Boleh Mengizinkan Demokrasi Kita Dikorupsi

Teman-teman, 24 tahun lalu, Reformasi akhirnya berhasil mencapai sesuatu yang mengelak Indonesia selama 55 tahun lebih: Demokrasi dan hak-hak asasi manusia diinstal dalam Undang-undang Dasar kita. Dalam prasaran ini saya mau menegaskan bahwa kita jangan mengizinkan demokrasi, hasil suatu perjuangan berdarah, dibusukkan, dibongkar atau dikorupsi lagi. Saya akan menunjuk pada ancaman-ancaman terhadap demokrasi kita sekarang. Sebelumnya saya akan memperlihatkan mengapa demokrasi begitu penting. Saya akan menunjukkan bahwa demokrasi merupakan tuntutan etika yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, bahwa kekuasaan yang tidak dilegitimasi secara demokratis adalah tidak sah, maka bahwa demokrasi tidak boleh kita biarkan digagalkan lagi.

KELAHIRAN DEMOKRASI MODEREN

Mari kita melihat dulu faktor-faktor mana yang melahirkan demokrasi. Saya mengabaikan demokrasi Yunani dan pemi-

kiran Platon dan Aristoteles dan langsung bertanya tentang sumber-sumber demokrasi modern.

Secara singkat, demokrasi lahir sebagai akibat pembongkaran feodalisme oleh pencerahan. Sejak abad ke-17 orang makin tidak dapat percaya lagi bahwa para raja dan kaum bangsawan memiliki privilese mereka karena suatu penetapan Tuhan. John Locke menegaskan bahwa seorang raja hanya memerintah secara sah atas dasar persetujuan rakyatnya, persetujuan mana harus dituangkan dalam suatu undang-undang dasar. Montesqieu meyakinkan dengan penegasan bahwa tiga kekuasaan politik: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, harus dipisahkan. Rousseau mencestuskan istilah yang akan menjadi inti tuntutan para demokrat: "**Kedaulatan Rakyat**". Atas nama kedaulatan rakyat Revolusi Prancis menyingkirkan monarki dan menggantikannya dengan republik.

Jadi dasar klaim demokrasi adalah suatu keyakinan etis amat fundamental. Yaitu bahwa setiap manusia, karena ia manusia, mempunyai hak dan martabat yang sama, bahwa setiap manusia lahir bebas dan karena itu segenap kekuasaan manusia atas manusia harus dilegitimasi oleh mereka yang dikuasai. Keyakinan-keyakinan ini dirincikan sebagai hak-hak asasi manusia.

Keyakinan dasar etis itu dalam dimensi politik menjelma dalam cita-cita demokrasi. Inti negara demokratis adalah adanya suatu undang-undang dasar yang menjamin kebe-

basan dan hak-hak asasi manusia segenap orang, kedudukan yang sama semua orang di hadapan undang-undang, hak partisipasi segenap orang dalam penetapan kebijakan negara dan peran negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum (Haryatmoko).

Cita-cita demokratis yang mulai menjadi realitas politik dalam *Declaration of Independence of the United States of America* tahun 1776 dan dalam Revolusi Prancis 1789-95, semakin diyakini di Barat sejak abad ke-19 dan di abad ke-20 menjadi kenyataan. Dapat ditambah bahwa sukses demokrasi diperkuat oleh kenyataan bahwa baru dalam demokrasi rakyat mencapai tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial, ekonomis dan kultural yang tinggi.

INDONESIA DAN DEMOKRASI

Indonesia mengalami perdebatan hebat mengenai demokrasi di tahun 1945 waktu para *founding fathers* meletakkan dasar-dasar kemerdekaan. Semua setuju bahwa Indonesia harus menjadi sebuah demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat. Akan tetapi tentang apa implikasi keyakinan itu bagi Indonesia mereka berbeda tajam. Hatta menuntut agar hak-hak asasi demokratis –kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat– ditetapkan dalam undang-undang dasar, tetapi Sukarno menolak dengan argumen bahwa "kita rancangan UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu", searah dengan kekhawatiran Supomo jangan-jangan demokrasi itu melawankan individu terhadap

masyarakat. Dengan akibat bahwa UUD tanggal 18 Agustus 1945 tidak memuat jaminan demokratis.

Waktu memaksa saya untuk meloncati 53 tahun sampai kita ke Reformasi. Reformasi, dengan pengalaman 32 tahun pemerintahan Suharto, akhirnya berhasil betul-betul menginstall demokrasi dan hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar kita, itu pun atas dasar Pancasila. Suatu prestasi yang luar biasa. Bahwa di tahun-tahun itu Indonesia berhasil –dengan kekecualian tragis Papua– mengakhiri secara positif sekian konflik berdarah yang pecah di sekitar waktu reformasi merupakan prestasi pendukung demokrasi yang luar biasa.

DEMOKRASI INDONESIA DALAM KRISIS?

Sekarang, 25 tahun sesudah Reformasi, demokrasi kita berada dalam krisis. Mengapa? Karena Reformasi tidak berhasil melaksanakan tuntutan inti para mahasiswa: "Brantas KKN". Korupsi, kolusi atau oligarki dan nepotisme tetap, dan semakin, merajalela.

Yang moncolok adalah nepotisme. Nepotisme berarti bahwa bukan prestasi dan diskursus dalam persaingan politik yang membawa orang ke posisi kekuasaan (Haryatmauko), melainkan karena ayah atau ibu maupun anak-tersayang menjadi penguasa. Kok para pemimpin bangsa besar seperti bangsa Indonesia tidak memikirkan bangsa, melainkan anak

emas mereka. Apa tak malu? Malu ketahuan wawasannya seperti itu?

Kolusi, berarti bahwa pihak-pihak yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, saling mendukung demi keuntungan bersama. Kolusi itu menghasilkan oligarki, di mana pemerintahan dikuasai oleh koalisi antara para tokoh politik dan ekonomi untuk mengendalikan perpolitikan dan perekonomian negara. Bukan rakyat yang diwakili, melainkan kepentingan tokoh-tokoh itu. Hal mana menjadikan perpolitikan menjadi tempat subur bagi segala macam korupsi.

SEBAB-SEBAB KRISIS DEMOKRASI

Tentu sebab-sebab krisis demokrasi kita kompleks. Sebutkan saja mental para pemimpin yang masih "feodal", belum menerapkan etika kepemimpinan tanpa pamrih syarat keberhasilan demokrasi. Masyarakat yang belum menginternalisasikan demokrasi sebagai kebutuhan dan, selama tidak dialami gangguan, tidak akan langsung bereaksi terhadap gejala-gejala KKN itu.

Salah satu alasan utama krisis demokrasi adalah kelemahan partai-partai politik. Partai-partai kita tidak punya orientasi ideologis, melainkan murni politis-dinastik: Partai terbentuk sekitar seorang dinasti yang mencari pengaruh, dan orang masuk partai, karena mengharapkan bisa maju dengan *ndherek* dinasti itu. Mereka tidak mewakili rakyat, melainkan dinasti pemimpin partai.

Salah satu sebab kenyataan fatal itu adalah mahalnnya mau menjadi wakil rakyat. Kalau diperlukan dana lima sampai sepuluh milyar rupiah, hanya orang yang sangat kaya, atau yang disponsori oleh orang yang sangat kaya, bisa menjadi wakil rakyat. Dengan sendirinya mereka tidak mewakili rakyat, melainkan pihak-pihak yang memungkinkan mereka.

Dan, kok tak ada partai kiri dalam dewan-dewan perwakilan rakyat kita? Tak ada demokrasi beneran tanpa partai kiri, partai yang mewakili rakyat bagian yang tertinggal. Lha kita di Indonesia, 9% masyarakat masih miskin, 40% lagi belum betul-betul sejahtera. Kok tak ada partai yang mewakili petani kecil, nelayan kecil, buruh kecil, para pedagang di kaki lima dan sebagainya?

Dan pemerintah kita tidak berhadapan dengan suatu oposisi. Tak pernah kedengaran kritik terhadap pemerintah dari para wakil rakyat. Ternyata hampir semua partai – 80% anggota DPR– sudah dibujuk *pejah gesang ndhèrèk* Pemerintah. Pemerintah yang menjamin kementerian-kementerian dan kedudukan-kedudukan lain yang menjanjikan. Itu membusukkan demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa oposisi. Berbeda dengan pandangan bahwa "kita tidak mengenal oposisi karena ada gotong-royong" oposisi demokratis adalah cara paling bagus untuk mengatasi perbedaan tanpa menimbulkan konflik.

XI-JINGPING-ISME?

Saya memperkirakan bahwa dalam jangka panjang hanya ada dua sistem politik yang mempunyai masa depan, yang dapat diharapkan membawa suatu negara ke masa depan yang sejahtera dan damai: Demokrasi dan apa yang mau saya sebut Xi-Jingping-isme.

Demokrasi sudah saya bahas. Tetapi, apa itu Xi-Jingping-isme? Itu sistem Cina sekarang dengan, secara ringkas, tiga unsur hakiki: (1) Seorang pemimpin otoriter, (2) sebuah partai ideologis yang mendukung, dan seperlunya menggantikannya, di Cina ya Partai Komunis, dan (3) suatu ideologi yang di satu pihak berdasarkan kepemimpinan mutlak partai komunis, di lain pihak betul-betul terarah pada kesejahteraan ekonomis, sosial dan bahkan kultural masyarakat. Cina begitu stabil karena, di bawah kediktatoran partai, rakyat Cina, sejak Deng Xiaoping, dengan pengembalian ekonomi pasar, dapat ke luar dari kemiskinan dan hidup sesuai dengan cita-cita kehidupan positifnya.

Apakah Xi-Jingping-isme bisa menjadi pilihan bagi Indonesia?

Ada perbedaan fundamental antara oligarki Cina dan oligarki Indonesia. Oligarki Indonesia bukannya ideologis, melainkan *kongkalikong* atas dasar kepentingan pribadi para oligark. Bukan sebuah partai yang secara ideologis merasa terikat memajukan orang kecil. Yang diwakilkan oleh oligar-

ki kita adalah modal. Barangkali mereka mempunyai motivasi untuk tidak mengizinkan korupsi terus merajalela. Akan tetapi, sistem oligarki berdasarkan orang bermodal terancam dalam dua hal:

Pertama, kepentingan para oligark dengan sendirinya adalah modal. Dalam kerangka neoliberalisme yang mengutamakan modal, orang kecil tidak terwakili. Seperlunya diabaikan, demi kemajuan ekonomi negara yang sekaligus merupakan kemajuan perekonomian para oligark. Ingat kasus Rempang. Demi sebuah proyek yang secara ekonomis menjanjikan beberapa ribu orang kecil yang tidak menyumbang apa pun pada perekonomian negara boleh, bahkan harus disingkirkan. Dengan lain kata: Xi-Jiping-isme model Indonesia, pemerintahan otoriter berdasarkan koalisi antara penguasa politik dan penguasa-penguasa modal, mengabaikan keadilan sosial, mengabaikan orang kecil. Di Afrika kita melihat bahwa puluhan juta orang kecil melarikan diri, dengan segala risiko kegagalan, daripada mati kelaparan di tempat asalnya. Kita mau menjadi negara seperti Konggo Kinshasa atau Simbabwe?

Yang *kedua*: Suatu Indonesia di bawah payung koalisi partai-partai DPR yang mewakili para oligark dengan pemerintah terancam justru tidak akan mencapai harapannya, yaitu suatu perekonomian yang tangguh. Mengapa? Karena kepentingan modal secara hakiki buta nilai kebangsaan. Modal ditanamkan di mana hasil yang diharapkan maksimal. Entah di

Indonesia, entah di luar Indonesia. Tak akan ada *incentive* untuk menanamkan modal di bidang atau daerah di Indonesia yang paling membutuhkannya. Ditambah bahwa, seperti yang kita lihat sejak lima tahun lebih, tekad untuk memberantas korupsi – korupsi membakar modal bangsa – akan berkurang karena kurang *friendly* terhadap pemodal yang penting. Pemberantasan korupsi akan menjadi sarana untuk menertibkan mereka yang tidak mau mendukung kebijakan pemerintah, atau yang oleh pemerintah dianggap sebagai ancaman, jadi tidak lagi secara sistematis dan adil. "Adil", kata itu tak terpakai dalam sistem otoriter berdasarkan koalisi para oligark.

KESIMPULAN

Maka sudah jelas, sistem Xi-Jinping, pemerintah otoriter dengan maksud baik, tidak merupakan alternatif yang menjanjikan bagi Indonesia. Hanya ada satu bentuk pemerintahan yang menyelamatkan Indonesia, yaitu demokrasi. Yaitu pemerintahan yang ditetapkan dan dikontrol oleh rakyat.

Hanya demokrasi yang dapat menyelamatkan Pancasila, khususnya sila nomor dua, tiga, empat dan lima. Pemerintahan otoriter berdasarkan konspirasi oligarki tidak dapat menjamin hak-hak asasi manusia-manusia Indonesia yang justru memerlukan perlindungannya, yaitu orang yang lemah, rentan, miskin, kurang berdaya. Keadilan sosial tidak dapat dijamin. Tetapi dengan demikian suatu sistem otoriter-oligarkis secara serius mengancam persatuan Indonesia: Di Afrika

saja kita melihat bahwa pengabaian segala macam manusia dan suku pinggiran menghasilkan perpecahan, pemberontakan, konflik internal. Indonesia adalah *the improbable nation*: bahwa kemajemukan etnik, budaya, bahasa dan orientasi agama, Indonesia, yang hidup di atas lebih dari seribu pulau, bisa, dari Sabang sampai Merauke, mewujudkan suatu Indonesia yang bersatu solid, di mana mereka dengan latar belakang kemajemukan itu merasa bangga bahwa mereka semua bangsa Indonesia, adalah suatu rahmat, rahmat Tuhan, yang akan gagal dan pecah begitu Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang asal mau menambah modal mereka.

Tak ada alternatif: Kita harus membuat demokrasi Indonesia berhasil.■

